

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK  
BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN  
DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT  
MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Sebagai Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**AGUNG SETIA BUDI**

**NIM. 11720415222**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Perda Nomor. 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan, Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Agung Setia Budi  
 Nim : 11720415222  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 April 2021

Pembimbing Skripsi

**Irfan Zulfikar, M. Ag.**  
 NIK. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KAB. INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **AGUNG SETIA BUDI**  
 NIM : **11720415222**  
 Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 08 Juni 2021**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Online (Daring)**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr.Amrul Muzan, S.Hi, M.Ag**

Penguji II  
**Bambang Hermanto, M.Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
 NIP. 19580712 1986031 005





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Agung Setia Budi (2021): Peran Satpol PP dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan, Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**

Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari banyaknya pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Seharusnya pedagang tuak ini tidak banyak persebarannya karena ada Satpol PP sebagai pemegang wewenang yang berwenang membantu berjalannya Peraturan Daerah dan mempunyai hak menertibkan serta memberikan ketentraman untuk masyarakat.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir dan apa faktor-faktor yang menghambat peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir serta juga Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan yang berlokasi di kantor Satpol PP Indragiri Hilir Jln.Swarna Bumi. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Satpol PP Kota Indragiri Hilir. Sedangkan data sekunder yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Quran dan Kaidah Fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan lapangan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait Peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir adalah belum sesuatu yang sepenuhnya menertibkan. Dimana peran Satpol PP belum maksimal dalam menertibkan pedagang tuak dibuktikan dengan masih banyaknya pedagang-pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir serta adanya faktor-faktor yaitu, masih banyaknya pedagang-pedagang tuak yang berjualan sembunyi-sembunyi maupun terbuka dan masih banyak remaja-remaja yang berkumpul-kumpul tengah malam sambil meminum tuak akibat kurang maksimalnya peran Satpol PP. Dengan demikian hasil dan penanganan yang dilakukan Oleh Satpol PP Indragiri Hilir tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

**Kata kunci: Satpol PP, Ketertiban Umum, Penyakit Masyarakat**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Fahrurrazi S.Pd), Ibunda (Harkasih) dan kakak perempuan (Riyani Eka Putri) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat di awal semester delapan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Irfan Zulfikar sebagai pembimbing skripsi penulis sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis karena kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra., Nurlaili M.Pd. (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada Bapak Abdul Rahmat Nurdin S.H selaku Kasatpol PP dan Bapak Andi Sapta Selaku Kepala Seksi Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Indragiri Hilir yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas B angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
9. Kepada Amanda Regina Putri, Aliffidin Royyan, Muhammad Gunawan Ginting yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 April 2021  
Penulis

**AGUNG SETIA BUDI**  
**NIM 11720415222**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulis .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir .....	18
B. Satuan Polisi Pamong Praja.....	24
C. Sejarah Polisi Pamong Praja .....	25
D. Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja .....	26
H. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja .....	27
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Peran.....	28
B. Minuman Tuak .....	31
C. Pengertian Penyakit Masyarakat .....	36
D. Latar Belakang Munculnya Penyakit Masyarakat .....	38
E. Bentuk-Bentuk Pencegahan Penyakit Masyarakat.....	41
F. Ketertiban Umum.....	42
G. Pemerintah Daerah .....	45
H. Pemerintah Dalam Konsep Fiqh Siyasah .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	55





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	61
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman belakangan ini menjadi pilar utama berubahnya pola kehidupan dan gaya hidup manusia. Hal ini menunjukkan taraf kehidupan semakin maju dan terus berkembang, namun hal ini bukan tanpa efek domino yang ikut serta memberikan negatif. Terdapat berbagai masalah yang ikut serta menjadi hal yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah dampak pada masalah sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas dan kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang dan teori).<sup>1</sup>

Masalah sosial yang sering menghantui ialah suatu kebiasaan buruk yang sulit untuk disadari atau dihilangkan salah satunya adalah Pedagang-pedagang minuman keras. Peredaran minuman keras di Indonesia pada saat ini sudah sangat cukup luas karena hampir disetiap daerah diwilayah hukum Indonesia terdapat toko-toko kecil hingga besar yang menjual berbagai minuman keras jenis yang diperjual belikan berbagai macam mulai dari yang beralkohol dari pabrik maupun hasil alami dari buah-buahan yang difermentasikan. Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah ada habisnya karena penikmat minuman keras yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman keras terus menjadi jadi guna memenuhi permintaan konsumen.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Irwanti Said, *Analisis Problem Sosial* (Makassar : Allaudin University Press, 2012), h.2

<sup>2</sup>Dirdjosworo Soedjono, *Minuman Keras di Indonesia dan Dampaknya*, (Bandung : Press, 1994), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minuman keras adalah minuman yang didalamnya zat alkohol dan ethanol minuman ini dihasilkan dari hasil fermentasi atau penambahan zat alkohol di dalamnya dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk, minuman keras dapat dibuat secara alami maupun kimiawi dan biasanya dibuat dari bahan-bahan alami seperti beras, gandum dan buah-buahan lain yang difermentasikan.<sup>3</sup>

Proses fermentasi itu sendiri adalah proses perubahan karbohidrat menjadi gula sederhana dan menghasilkan ethanol sebagai zat sampingan atau residu, zat ethanol inilah yang membuat seseorang menjadi mabuk karena zat ini mampu menekan sistem saraf pusat dan membuat orang kendali dan kesadarannya. Akibat buruk minuman keras adalah menyebabkan memiliki sifat kecanduan bagi peminumnya karena minuman keras mengandung alkohol termasuk dalam zat adiktif atau zat yang dapat menyebabkan kecanduan, jika tidak meminumnya dalam sehari-hari seseorang yang biasa mengkonsumsinya akan merasa gelisah dan tidak tenang sehingga sulit mengatasi rasa kecanduan tersebut ia akan terus mengulangi kebiasaannya.<sup>4</sup>

Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Bupati dengan acuan Undang-Undang yang berlaku sebagai bahan pedoman daerah untuk membuat dan membentuk peraturan daerah yang berlaku, dimana sebagai bahan pedoman daerah berhak membuat dan membentuk peraturan daerah sendiri. Dengan melihat dari masalah yang terjadi maka pemerintah daerah membuat Peraturan daerah. Peraturan daerah adalah semua peraturan

<sup>3</sup>Hartati Nurwijaya, *Bahaya Minuman Keras dan Cara Mencegahnya*, (Bandung: Gramedia, 2011), h.3

<sup>4</sup>*Ibid*, h.3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.<sup>5</sup> Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain :

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi Pemerintahan Daerah.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (madebwind) dengan demikian perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sekaligus juga Peraturan Daerah merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.<sup>6</sup>

Salah satu peraturan daerah yang dikeluarkan salah satu pemerintah Kabupaten adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat, yang sebagaimana terdapat dalam Bab VII Perda menjelaskan :

1. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kewenangan untuk :
  - a. Pembinaan tertib hukum (Perda dan Peraturan Kepala Daerah).
  - b. Melakukan langkah-langkah sosialisasi berbagai Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya secara sistematis, menyeluruh dan terpadu.

<sup>5</sup>Ibid, h, 136.

<sup>6</sup>Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengatur Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1998), h, 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan langkah-langkah pembinaan, pencegahan dengan pendekatan persuasive edukatif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah mengenai pelanggaran tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sesuai prosedur.
- d. Melakukan langkah-langkah penindakan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sesuai protap.
- e. Melakukan evaluasi dan penyebarluasan hasil penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat<sup>7</sup>

Setiap Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir, Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap tempat jualan/usaha apabila ada pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Perda :

- a. Memberikan teguran pertama kepada orang jualan/usaha yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat apabila dalam waktu 3 hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
- c. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat apabila

---

<sup>7</sup>Perda No. 11 Tahun 2016.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam waktu 3 hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.

- d. Memberikan surat peringatan dalam waktu 1 hari agar orang/badan hukum tersebut menertibkan diri apabila setelah surat peringatan dilakukan belum diindahkan.
- e. Apabila setelah surat peringatan tidak diindahkan juga maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.<sup>8</sup>

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengantisipasi banyaknya pedagang-pedagang tuak yang semakin berkembang dimasyarakat Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Kecamatan Tembilahan. Pada dasarnya minuman keras dilarang diperjual belikan karena merusak ahlak, moral dan jatin diri bangsa bagi peminumnya yang akhirnya menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, disamping telah melanggar larangan agama yang kelak akan mendapat dosa dan siksaan diakhirat nanti bila pelakunya tidak bertobat dan tidak berlakunya Undang-Undang yang mengatur hal tersebut.<sup>9</sup>

Minum-minuman keras dalam jumlah banyak akan mengakibatkan peminum sempoyongan, bicara tidak jelas daya ingat dan kemampuan menilai sesuatu terganggu untuk sementara waktu. Dalam jumlah lebih lagi dapat menyebabkan koma bahkan kematian. Maka dari itu Minuman keras atau khamr dapat mengakibatkan :

<sup>8</sup>Perda No.11 Tahun 2016.

<sup>9</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung :Penerbit Angkasa, 2005), h. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Gangguan Kesehatan Fisik
2. Gangguan Kesehatan Jiwa
3. Gangguan Fungsi Sosial
4. Gangguan Terhadap Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat.<sup>10</sup>

Oleh karena itu dalam menjalankan peraturan daerah haruslah bijak, karena suatu hal yang dilakukannya haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kenyataan dan tidak bertentangan dengan syariat islam, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan dimana kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman, tenteram dan damai diperlukan suatu tata. Tata yang berwujud aturan yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya lazim disebut kaidah atau norma .

Norma mempunyai dua isi yang berwujud antara lain sebagai berikut :

1. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu, oleh karena akibatnya dipandang tidak baik.
2. Larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang tidak baik.<sup>12</sup>

Banyak orang yang terkena gangguan saraf karena minuman keras bahkan tega membunuh sesama manusia. Allah Berfirman Dalam Surah al-Maidah ayat 90 :

<sup>10</sup>M. Wresniworo, *Masalah Narkotika, Psikotropika Dan Obat-Obat Berbahay*, (Jakarta : Bina Dharma Pemuda Perinting, 1999), cet ke-1, h.219

<sup>11</sup> Abu Ridha, *Karakteristik Politik Islam*, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2004), h. 26

<sup>12</sup> Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". (Q.S Al-Maidah : 90)

{رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}, Adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan

{فَاجْتَنِبُوهُ}, Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}, Agar kalian mendapat keberuntungan

Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa rijsun artinya perbuatan yang dimurkai (Allah) dan termasuk perbuatan setan. Menurut Sa'id Ibnu Jubair, arti rijsun ialah dosa. Sedangkan menurut Zaid Ibnu Aslam disebutkan bahwa makna rijsun ialah jahat, termasuk perbuatan setan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Surah al-Maidah ayat 90 dan Tafsir Ibnu Katsir di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa minuman khamr jelas tidak boleh dikonsumsi mau sedikit ataupun banyak apalagi untuk diperdagangkan karena mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras dapat mendatangkan mudharat atau keburukan bagi seseorang yang mengkonsumsinya. Adapun mudharat yang dapat menjadi alasan mengapa minuman ini diharamkan juga karena merusak kesehatan, membuat candu dan hilang kesadaran.

<sup>13</sup>M. Abdullah Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir lengkap*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i)2003, h. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Di Kabupaten Indragiri Hilir sudah diberlakukan penerapan bagi penjual minuman keras untuk tidak lagi menjual minuman keras sejenis tuak dan minuman keras lainnya karena sangat meresahkan masyarakat terutama sangat berpengaruh buat remaja di Tembilahan karena kebanyakan anak muda di Tembilahan yang terjebak dalam pencandu minuman keras tuak hampir merata kedapatan sedang kumpul-kumpul mabuk adalah remaja yang masih muda. Beberapa alasan anak-anak remaja lebih memilih tuak adalah karena mereka belum memiliki banyak uang untuk membeli minuman beralkohol lainnya. Harga yang cukup mahal dan tidak dapat dijangkau oleh anak usia sekolah untuk membeli minuman beralkohol lainnya ternyata tidak menyurutkan keinginan mereka untuk berhenti mengkonsumsi minuman yang dilarang oleh agama. Dengan begitu mereka memilih tuak untuk dijadikan bahan bermabuk-mabukan karena harganya yang lebih terjangkau.<sup>14</sup>

Maka dari itu sangat disayangkan meskipun sudah dibuat Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat di Kabupaten Tembilahan Indragiri Hilir masih saja Penyakit masyarakat yang sulit dihilangkan adalah terutama pedagang-pedagang minuman keras yang sudah beberapa kali dikasih peringatan untuk tidak lagi menjual minuman keras dan disarankan beralih profesi lain. Akan tetapi dari studi pendahuluan yang penulis lakukan di lapangan penulis melihat masih banyaknya pedagang tuak serta dampak-dampak yang terjadi akibat masih adanya peredaran minuman

<sup>14</sup> Hak Cipta, 2020. Dimiliki oleh penulis, dipublikasi oleh Society, Artikel dengan akses terbuka. lisensi : CC-BY-NC-SA [https:// doi.org/10.33019/society.v8i1.168](https://doi.org/10.33019/society.v8i1.168), h.261.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keras berjenis tuak. Berikut beberapa contoh gejala yang masih ditemukan penulis yang terjadi dilapangan :

1. Masih banyaknya pedagang tuak yang masih berjualan secara terbuka ataupun secara sembunyi-sembunyi.
2. Masih banyak pedagang tuak yang menyediakan minuman tuak diarea apabila ada acara orgen tunggal.
3. Banyaknya anak-anak muda keluyuran tengah malam dan nongkrong dipinggir jalan sambil meminum tuak, bahkan sering meresahkan warga karena bisa meminta-minta uang terhadap siapapun yang lewat.
4. Menyebabkan perkelahian antar remaja karena pengaruh minuman tuak.

Maka dari itu sebagaimana yang dicantumkan didalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat Nomor 6 bahwasannya Satpol PP Inhil berhak memberikan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda. Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan Peraturan Daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewangan dan penegakkan hukum dalam konteks daerah.

Melihat banyaknya persebaran pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan dan melihat pentingnya peran Satuan Polisi Pamong praja sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perangkat pemerintah daerah, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Peran Satpol PP dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Peraturan Daerah No . 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat menjadi terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Tuak berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat di kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak menurut perspektif fiqh siyasah dan Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir serta tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perda No.11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penindakan Ketertiban

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum Serta Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir?

2. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang Tuak di Kecamatan Tembilahan?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Tuak di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syariah Dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan islam.
2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (Subjek) itu sendiri. Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang di gunakan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena di Kecamatan Tembilahan peneliti banyak melihat pedagang-pedagang minuman keras berupa tuak serta peneliti sering melihat remaja-remaja yang mabuk-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mabukan dipinggir jalan padahal didalam peraturan daerah indragiri hilir sudah ada aturan yang mengatur tentang penyakit masyarakat dan Indragiri hilir adalah kampung halaman peneliti sehingga bisa menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan yang di jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, Sedangkan Objek adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Tuak di Kecamatan Tembilahan.

### **4. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penjas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kasatpol PP yang berjumlah 1 orang dan Kepala Seksi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berjumlah 1 orang serta salah satu pedagang tuak sebagai penguat.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dinamakan sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Oleh karena jumlah populasi tidak sampai berjumlah 100 orang, maka semua populasi dijadikan sebagai sampel yaitu berjumlah 3 orang.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

### b. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mencari data dan informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

**7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena persepsi Pedagang Tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polannya.
- c. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelum-belumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## G. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang memuat tentang Sejarah Indragiri Hilir, Kondisi Geografis, Deskripsi Kecamatan Tembilahan, Sejarah Kecamatan Tembilahan, Profil Kecamatan Tembilahan, Motto Kecamatan Tembilahan, Keadaan alam.

## **BAB III : TINJUAN TEORITIS**

Pada bab ini dijelaskan mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja, Kriteria Peran, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta pengertian fiqh siyasah dan ruang lingkupnya.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Adapun dalam bab ini akan diuraikan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Di Kecamatan Tembilahan, Serta tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Tuak di Kecamatan Tembilahan.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Deskripsi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

##### 1. Sejarah Kecamatan Tembilahan

Seiring dengan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir yang diawali pada decade kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih menjadi satu kesatuan Kabupaten Indragiri terdiri atas 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi Ibu Kotanya Teluk Kuantan, Kabupaten Indragiri Hulu Ibukotanya Rengat dan Indragiri Hilir Ibu Kotanya Tembilahan. Berawal dari keinginan untuk memisahkan diri maka melalui kesepakatan bersama, masyarakat Indragiri Hilir meminta Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah tingkat II berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri, pemekaran disetujui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tertanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya pada tanggal 14 juni 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah daerah Kabupaten tingkat II Indragiri Hilir (Sekarang Kabupaten IndragiriHilir) sebagai salah satu Kabupaten di Riau terhitung tanggal 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

November 1965. Perkembangan tata pemerintah selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi 2 Kabupaten Masing-Masing:<sup>15</sup>

Kabupaten Indragiri Hilir Utara dengan Ibu Kotanya Meliputi Kecamatan :

- a. Kecamatan Tembilahan;
- b. Kecamatan Tempuling;
- c. Kecamatan Gaung Anak Serka;
- d. Kecamatan Mandah;
- e. Kecamatan Kateman;
- f. Kecamatan Kuala Indragiri.

Kabupaten Indragiri Hilir Selatan dengan Ibu Kotanya Enok Meliputi Kecamatan :

- a. Kecamatan Enok
- b. Kecamatan Reth

## **2. Profil Kecamatan Tembilahan**

### **a. Geografis Kecamatan Tembilahan**

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km<sup>2</sup> atau 19,737 Ha. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :<sup>16</sup>

- 1) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka
- 2) Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu

<sup>15</sup>Kantor Camat Tembilahan, dilihat pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 10:21

<sup>16</sup> Kantor Camat Tembilahan, dilihat pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 10:21



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Enok
- 4) Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka

**b. Keadaan Alamnya**

Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Dipinggir sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah, pohon bakau, pohon pedada, Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.<sup>17</sup>

**c. Iklim dan Curah hujan**

Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juni 2010 yaitu 217 mm dan terendah pada bulan desember yaitu 42 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan juli sebanyak 23 hari dan terendah terjadi pada bulan januari sebanyak 7 hari.

Sejalan dengan adanya perkembangan Kota Tembilahan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan penduduk, lingkungan hidup, perekonomian terutama tingkat pelayanan masyarakat maka akan terjadi perubahan keseimbangan antara kuantitas/kualitas yang signifikan didalam suatu daerah pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan Kota Tembilahan yang merupakan daerah koleksi, distribusi, dan

<sup>17</sup> Kantor Camat Tembilahan, dilihat pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 10:21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasaran bagi produksi wilayah sekitarnya, terutama dalam menunjang sector pertanian, industri dan perhubungan Maka arah perkembangan yang akan dilaksanakan pemerintah Kecamatan mengacu pada proses pembangunan yang diupayakan melalui:

- 1) Pengembangan kawasan pelabuhan berikut sarana dan prasarana pendukung;
- 2) Penetapan kawasan pengolahan pertanian,peternakan,perkebunan;
- 3) Pembangunan peningkatan dan rehabilitas jaringan jalan darat terutama jaringan yang berhubungan dengan transportasi umum antara daerah yang diikuti dengan penetapan daerah sentral lokasi terminal, sub terminal, dan pangkalan sementara;
- 4) Alokasi sarana dan prasarana yang disesuaikan prioritas pmbangunan dengan kebutuhan yang ada;

**d. Penduduk**

Suku asli daerah Indragiri Hilir adalah Suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada didaerah Riau lainnya. Suku melayu di Daerah Indragiri Hilir juga memiliki sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama islam, hal tersebut terlihat dengan dating dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke Indragiri Hilir yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun yang dilaksanakan pada bulan desember 2020 sebanyak 65.752 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 32.004 jiwa dan perempuan 30.748 jiwa dengan sex ratio 104 serta kepadatan penduduk 318 jiwa per km<sup>2</sup>. Pada umumnya bermata pencarian dibidang pertanian pangan, perkebunan dan sebagainya bergerak dibidang nelayan, perdagangan dan kerajinan industry. Penduduk Kecamatan Tembilahan disamping suku Melayu ( asli ) antara lain :

- 1) Suku Banjar
- 2) Suku Bugis
- 3) Suku Jawa
- 4) Suku Laut/Nelayan

### 3. Motto Kecamatan Tembilahan

Motto Kecamatan Tembilahan adalah Kota Ibadah yang merupakan frase atau kalimat yang dipergunakan sebagai semboyan atau symbol yang bermakna pesan moral bahwa Tembilahan adalah Kota “ *Indah , Bersih , Arsi , Damai , Aman dan Harmonis*” Dimana makna ibadah mempunyai pesan moral bahwa nilai atau nuansa religious melekat pada Masyarakat Kota Tembilahan Indragiri Hilir yang heteronigtas memiliki keragaman budaya /suku dan agama dalam satu kesatuan hidup yang di wujudkan sehingga menjadi masyarakat kota yang harmonis.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Kantor Camat Tembilahan, dilihat pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 10:21

#### 4. Visi dan Misi Kecamatan Tembilahan

##### a. Visi

Terwujudnya Tembilahan sebagai “*Kota Ibadah*” dengan berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh infu struktur dan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas.

##### b. Misi

- 1) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan dan kelurahan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat;
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehat dan sehat paripurna;
- 3) Mewujudkan sarana pembangunan infra struktur dalam mendukung pembangunan dibidang kebersihan, keamanan, dan ketertiban serta cakupan iptek yang bernuansa IMTAQ
- 4) Mewujudkan pembangunan budaya tertib, budaya bersih, dan budaya gotong royong;
- 5) Menumbuh kembangkan prakarsa , kreativitas , peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah;
- 6) Fungsi kawasan yang saling mendukung;
- 7) Membangkitkan citra kota tepi sungai;
- 8) Fungsi pelayanan kota dengan kelengkapan sarana dan fasilitasnya;<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Kantor Camat Tembilahan, dilihat pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 10:21

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah” (pasal 148 ayat (1) UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah) kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam ketertiban umum dan penyakit masyarakat serta penegakan peraturan daerah sehingga berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, “Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”.<sup>20</sup>

<sup>20</sup>Dirjen PUOD, Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, (Jakarta:Dirjen POUD), h. 4

### C. Sejarah Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 Moto Praja Wibawa, muntuk mewedahi sebagai ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman colonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidal stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 maret 1950. Inilah awal terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di luar jawa dan Madura, dengan dukungan para Petinggi/Militer Angkatan perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekosentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No. 22/1999 dan direvisi menjadi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>21</sup>

#### **D. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3, dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah “Perangkat” daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah “ (pasal 148 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) kepala daerah dalam hal ini Bupati Indragiri Hilir.

<sup>21</sup><http://;Sejarah Satpol PP>. Diakses 7 maret 2021 pukul 19:07

## E. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan
  - a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis
  - b. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Sosial Kemasyarakatan
  - c. Seksi Bina PPNS dan Kajian
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenraman
  - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
  - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan
  - c. Seksi Kerjasama
5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
  - a. Seksi Bina Aparatur
  - b. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat
  - c. Seksi Data dan Informasin
6. Bidang Pemadam Kebakaran
  - a. Seksi Pencegahan Kebakaran
  - b. Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
  - c. Seksi Pasca Kebakaran.<sup>22</sup>

<sup>22</sup><https://polpp.kulonprogokab.go.id> di akses tanggal 26 Maret 2021 pukul 23:57



### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS

##### A. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto 9 (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahkan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial.<sup>23</sup>

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup 3 hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu . Mifta Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan . Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk .

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 5.

<sup>25</sup>J. Dwi Narwoko dan Suyatno Bagong, "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan". (Jakarta: Kencana, 2013), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>26</sup>

1. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan penilaian ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan ;
2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang tuak, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, seperti perannya dalam menyelesaikan permasalahan banyaknya pedagang minuman keras sejenis tuak di Indragiri Hilir merupakan salah satu dari beberapa tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri Hilir.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 6.

## B. Minuman Tuak

### 1. Pengertian Tuak

Tuak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minuman yang dibuat dari nira aren (kelapa) atau siwalan yang diasamkan sampai beralkohol (ada yang keras dan tidak keras), yang keras mengandung banyak alkohol, sedangkan yang tidak keras lebih manis tidak mengandung banyak alkohol. Tuak juga dapat disebut dengan arak di Nusantara yaitu sejenis minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang berkadar rendah, harus banyak diminum supaya bisa mencapai efek yang diharapkan bila dibandingkan dengan minuman alkohol lainnya seperti bir dan anggur. Sebagai bagian dari alkohol tuak adalah minuman psikoaktif yang diklarifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang, yang berarti minuman tuak akan menekan berbagai kegiatan dari sistem syaraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, tuak ini terlihat berkerja sebagai pembuat stimulasi karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologi dan psikologis.<sup>27</sup>

Tuak adalah suatu jenis cairan yang dihasilkan dari nira kelapa atau sejenis pohon penghasil nira lainnya seperti siwalan, lontar dan aren yang disadapannya tersebut dидiamkan selama beberapa hari. Nira rasanya manis, tidak berwarna serta harum jika masih keadaan segar. Secara umum

<sup>27</sup>Syeni Adestina Savira, "Persepsi Ekonomi Penjual Tuak Di Desa Palang Kabupaten Tuban Terhadap Penjualan Tuak", Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hal 37, [http://digilib.uinsby.ac.id/33299/1/syeni%20Adestina%20Savira\\_G7421518.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/33299/1/syeni%20Adestina%20Savira_G7421518.pdf) diakses pada tanggal 21 Januari 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian tuak adalah sebutan untuk minuman yang terbuat dari beras, nira (cairan manis), atau minuman/buah lain yang mengandung gula yang difermentasikan yang dibantu oleh bakteri *saccharomyces*.

Tuak adalah sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula seperti palem, korma, dan lain-lain. Tuak memiliki sedikit alkohol dibanding dengan minuman pabrik tapi tetap juga dapat membahayakan bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Secara umum tuak yang dikenal di Indonesia adalah dengan nama arak, sementara istilah tuak ini sendiri adalah nama yang disebut di Sumatera Utara khususnya di daerah Batak. Tuak ini sendiri adalah minuman khas tradisional yang telah turun temurun dari nenek moyang di tanah batak dan tetap eksis hingga sekarang.<sup>28</sup>

Tuak adalah minuman beralkohol khas Batak yang terbuat dari batang aren atau batang kelapa yang diambil airnya lalu dicampurkan dengan raru. Selain itu ada pula tuak yang sama sekali tidak dicampur dengan raru yakni tuak tangkasan. Tuak tangkasan ini pada zaman dahulu sering dipakai dalam upacara adat. Bahan pokok pembuatan tuak yang paling umum adalah nira yang berasal dari pohon enau atau nipah serta legen yang berasal dari pohon tal atau siwalan (lontar).<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Uknow, <https://arlington-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentang-tuak.html> diakses tanggal 22 januari 2021.

<sup>29</sup> Muchtadi TR Sugiono <https://www.definisidariparaahli.com/pengertian-tuak/> di akses tanggal 21 januari 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pohon siwalan atau pohon lontar ini sejenis pohon palma (pinang pinangan) yang tumbuh di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pohon tersebut menjadi flora identitas Provinsi Sulawesi Selatan, namun pohon ini juga tumbuh di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah Bagian Timur, Madura, Bali, Nusatenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Manfaat lontar cukup banyak. Nirannya dapat dibuat minuman segar dan makanan penyegar/pencuci mulut berkalori tinggi, cuka atau kecap, dan gula lontar/gula lempeng/gula semut. Buahnya untuk manisan atau buah kalengan, kue, selai, obat kulit (dermatitis) dan daging buahnya untuk bahan dempul. Bunganya atau bau mayang untuk obat sakit liver, dan daunnya dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan. Lontar merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi sebagai sumber bioetanol. Bioetanol adalah kandungan etanol (alkohol) tetapi harus difermentasikan terlebih dahulu.

## **2. Proses Pembuatan Tuak**

Proses pembuatan tuak tersendiri membutuhkan berbagai proses diantaranya sebagai berikut. Tahap pertama yaitu mengambil nira atau legen yang terdapat pada buah atau tumbuhan yang bahan baku pembuatan tuak, seperti: kelapa, aren, siwalan, tal. Selanjutnya air nira atau legen kedalam sebuah wadah tertutup (botol berukuran besar) dengan suhu yang sesuai. Tahap kedua diamkan air nira dalam beberapa hari, sehingga molekul organik dalam air nira atau legen dapat mengalami perubahan menjadi bahan antara, yang dalam hal ini yang dibantu oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mikroorganisme: seperti *Saccharomyces cerevisiae* dan *Zimomonas mobilis* (fermentasi). Tahap ketiga setelah proses fermentasi berhasil maka air nira akan berubah menjadi minuman beralkohol yang disebut dengan tuak.<sup>30</sup>

Dalam pembuatan minuman tuak proses yang dilakukan yaitu: pertama paragat dipotong setengah dari pangkal ataupun tandan arirang tersebut. setelah di potong dan dibilas dengan air, kemudian diris tipis serta dilumuri dengan resep-resep tertentu berupa daun-daunan ataupun resep-resep lain. Saat dipotong arirang tersebut sebenarnya sudah mengeluarkan getah yang kental. Tetapi belum bisa langsung ditampung. Terkadang pragat membiarkannya sampai dua hari. Sampai arirang benarbenar diyakini telah berkulaitas maka mulai paragat menampung tuak yang menetes demi setetes tersebut dengan wadah yang di gantungkan tepat dibawah tetesan arirang tersebut.

Tuak ini akan diambil oleh paragat dua kali sehari, yaitu pagi dan sore Disamping mengambil tuak paragat mengiris arirang secara bersamaan dua kali sehari. Air tuak yang dihasilkan aring ini masih kental dan putih sedikit berlendir dan rasanya manis. Tuak seperti ini disebut tuak na tonggi dan belum mengandung alkohol. Baru setelah raru di celupkan selama beberapa jam maka tuak akan berubah menjadi sedikit pahit dan memiliki dosis alkohol yang dapat memabukan. Raru adalah kulit pohon tertentu yang sudah kering yang berfungsi sebagai perubah rasa dan

<sup>30</sup> Syeni Adestina Savira, "Persepsi Ekonomi Penjual Tuak", hal.38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penumbuh dosis yang dicampurkan ke tuak. Setelah benar-benar memiliki rasa yang pas di kerongkongan barulah kemudian dipasarkan ke lapo-lapo tuak yang menjadi langganan sang paragat tersebut.<sup>31</sup>

### 3. Dampak Minuman Tuak

Segala aspek tentunya memiliki dampak secara positif dan negatif. Tidak menutup kemungkinan untuk minuman keras yang telah dikonsumsi tentu memiliki efek samping baik secara jangka panjang ataupun jangka pendek. Secara umum dampak yang dirasakan setelah meminum minuman keras dalam jangka pendek adalah mulut terasa kering, pupil mata membesar, detak jantung lebih kencang, rasa mual serta kesulitan bernafas. Kemudian untuk dampak jangka panjangnya adalah adanya ancaman kesehatan yang serius seperti kerusakan pada hati, ginjal, paru-paru, jantung radang usus, penyakit liver, bahkan hingga gangguan jiwa.

Dalam hal ini minuman tuak juga memiliki efek atau dampak setelah mengkonsumsinya baik dari segi negatif maupun positif. Berikut dampak minuman tuak diantaranya sebagai berikut:

- a. Dampak positif
  - 1) Mengobati sariawan
  - 2) Mempelancar ASI
  - 3) Sebagai bahan membuat gula aren.
  - 4) Bahan campuran pada pembuatan kue.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Uknow <http://arlinton-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentang-tuak.html> diakses tanggal 8 April 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Dapat menyembuhkan penyakit kencing batu
- 6) Dapat digunakan sebagai penambah stamina tubuh
- 7) Dapat digunakan sebagai penawar obat lain dan operasi
- b. Dampak negatif
  - 1) Kehilangan kesadaran
  - 2) Dapat merusak hati
  - 3) Dapat merusak ginjal
  - 4) Dapat merusak paru-paru
  - 5) Gangguan penyakit liver<sup>33</sup>

### C. Pengertian Penyakit Masyarakat

Secara defenitif belum ditemukan pengertian baku tentang penyakit masyarakat, sebab nama tersebut baru dipopulerkan akhir-akhir ini. Ada kata-kata yang hampir mendekati pengertian tersebut misalnya, kejahatan, tindakan kriminal, penyalanggunaan obat, dan penyimpangan terhadap norma dan agama.<sup>34</sup> Akan tetapi kata-kata tersebut hanyalah bagian dari penyakit masyarakat. Untuk mengetahui makna dari penyakit masyarakat, maka perlu diketahui arti dasar dari kedua nama tersebut. Penyakit masyarakat terdiri dari dua kata yaitu penyakit dan masyarakat. Penyakit adalah keadaan tidak normal

<sup>32</sup>Ibid

<sup>33</sup>Sukma Mardiyah Panggabea, "Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak Di Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Berita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015" *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), Hal. 28. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30121/SUKMA%20MARDIYAH%20PANGGABEAN-FKIK.Pdf> di akses 8 April 2021.

<sup>34</sup>Kejahatan atau Kriminal adalah pelanggaran terhadap peraturan yang telah dicantumkan dalam undang-undang. Lihat: James M.Henslin,*Sosiologi dengan pendekatan Membumi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Jilid I, h.148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pada badan atau pikiran yang menyebabkan ketidakselesaian, disfungsi, atau tekanan/stres pada seseorang. Kadang kala istilah ini digunakan secara umum untuk menerangkan kecederaan, kecacatan, sindrom, simptom, dan keburukan tingkah laku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan gangguan pada makhluk hidup atau kebiasaan yang buruk sesuatu yang mendatangkan keburukan. Oleh Yuniawan penyakit dipandang sebagai suatu fenomena kompleks yang berpengaruh negatif terhadap kehidupan manusia.<sup>35</sup> Ditinjau dari segi biologis penyakit merupakan kelainan berbagai organ tubuh manusia, sedangkan dari segi kemasyarakatan keadaan sakit dianggap sebagai penyimpangan perilaku dari keadaan sosial yang normatif. Penyimpangan itu dapat disebabkan oleh kelainan biomedis organ tubuh atau lingkungan manusia, tetapi juga dapat disebabkan oleh kelainan emosional dan psikososial individu bersangkutan. Faktor emosional dan psikososial ini pada dasarnya merupakan akibat dari lingkungan hidup atau ekosistem manusia dan adat kebiasaan manusia atau kebudayaan.

Penyakit dalam pandangan sosial sebenarnya berawal dari adanya perilaku sakit. Perilaku sakit yang dimaksud adalah adanya berbagai penyimpangan normatif-agamis yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia dianggap sebagai pribadi yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu perilaku dan cara hidup manusia dapat merupakan

---

<sup>35</sup>Penyimpangan merujuk pada pelanggaran norma, mulai dari pelanggaran sekecil mengemudi melampaui batas kecepatan maksimum, sampai dengan seserius seperti pembunuhan, atau hal-hal yang lucu (Jakarta: Erlangga, 2006), Jilid I, h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebab bermacam-macam penyakit baik di zaman primitif maupun di masyarakat yang sudah sangat maju peradaban dan kebudayaannya.<sup>36</sup>

#### **D. Latar Belakang Munculnya Penyakit Masyarakat**

Munculnya penyakit masyarakat dalam konteks hari ini, dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang sangat kompleks. Yang jelas ada dua penyebab munculnya penyakit masyarakat tersebut yaitu berasal dari faktor internal seperti motivasi dan minat yang sangat kuat untuk mencoba dan faktor eksternal yaitu berasal dari lingkungan, seperti ajakan dan pengaruh teman dan pengaruh pola hidup tempat tinggal.

##### **1. Krisis Ekonomi**

Krisis ekonomi yang berkepanjangan, telah membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Serta semakin sempitnya lapangan kerja, setidaknya dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas, ditengah-tengah masyarakat. Adanya perampokan, penipuan, perampasan, pencurian dengan pembunuhan, sampai pada kasus bunuh diri akhir-akhir ini semakin semarak di tampilkan di media massa.

Dari beberapa informasi yang ditemukan disimpulkan bahwa salah satu penyebab timbulnya tindakan kriminal sebagai bagian dari penyakit masyarakat lebih besar disebabkan oleh adanya kemiskinan dan krisis ekonomi. Demikian juga halnya dengan prostitusi atau pelacuran, banyak

---

<sup>36</sup> Sarlito Wirawan Sarwono memandang perilaku sakit diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan, sedangkan perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, *Sosiologi Kesehatan : Beberapa Konsep Serta Aplikasinya*. (Bandung: Gajah Mada University Press, 1993), Cet I, h.31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan karena masalah ekonomi yang sangat mendesak. Anak yang mesti sekolah, keluarga yang sakit butuh biaya dengan segera, sementara pekerjaan tidak ada atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga diduga menjadi pemicu mengapa banyak perempuan yang menjadi pelacur.<sup>37</sup>

## 2. Pergaulan dan Gaya Hidup

Miras yang biasa dikonsumsi para remaja, laki-laki dan perempuan, tidak ada kaitannya dengan masalah krisis ekonomi, tetapi hal ini lebih diakibatkan oleh adanya istilah gaya hidup dan pergaulan remaja. Banyak kalangan remaja yang mengkonsumsi miras atau ganja misalnya, karena pergaulan di antara mereka menyebabkan mereka harus mengikuti kebiasaan teman-temannya yang lagi dianggap trend. Jika tidak mabuk tidak dianggap hebat, jika tidak bertato tidak disebut jantan, dan berbagai istilah dan simbol-simbol lainnya yang cukup menyesatkan.

## 3. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan dapat memberi pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Sebagian besar prinsip dan kebiasaan itu bermula dari lingkungan dimana dia berada. Sebuah contoh misalnya, watak, cara pandang dan prinsip yang berbeda-beda di antara suku bangsa yang ada di Indonesia memberikan pertanda bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap pribadi manusia. Mengapa orang Jawa suaranya lembut, mengapa orang Batak suaranya keras, dan sering diterjemahkan

<sup>37</sup> Muhammad Jafar Anwar, *Penyakit Masyarakat di Jakarta*, (Jakarta:Artikel Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, 2005), h.2



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasar dan mengapa orang Minang selalu dikaitkan dengan dagang, semuanya itu berasal dari lingkungan. Demikianlah halnya dengan penyakit masyarakat, juga banyak disebabkan karena pengaruh lingkungan. Mengapa penyakit Aids/HIV banyak ditemukan di Irian dan bukan di Padang? Jawabannya adalah lingkungan. Dengan demikianlah benarlah kata-kata bijak yang menyatakan “siapa yang berkawan dengan orang yang baik, maka dia akan ikut menjadi baik”, “dan siapa yang berteman dengan orang jahat maka, dia akan ikut melakukan pekerjaan jahat.

**4. Coba-coba**

Amir Syarifuddin mengatakan:<sup>38</sup>

Pada dasarnya hawa nafsu yang berada dalam diri setiap orang itu mendorongnya untuk berbuat kejahatan. Ia ingin mendapatkan harta dengan mudah tanpa imbalan dan kesulitan; ia ingin melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang ia ingin mengusik ketenangan orang ia ingin memuaskan nafsunyadengan makanan dan minuman terlarang; ia ingin melenyapkan seseorang yang tidak disenanginya ia ingin menodai nama baik seseorang; ia ingin merusak apa yang ada dilingkungannya dan sebagainya.

Banyak perilaku buruk yang disebabkan oleh motivasi coba-coba. Misalnya ketika orang merokok, memakai ganja, menghisap putaw, nyabu dan perilaku lainnya. Pada dasarnya sebelum orang memakai

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mengkonsumsi benda-benda tersebut hampir seluruhnya berawal dari rasa ingin mencoba. Terlalu sering mencoba akhirnya menjadi kebiasaan. Pepatah orang Minang menyatakan alah bisa karena biasa. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan tentu sulit untuk menghindarinya. Ibarat perut, tidak dikasih makan satu hari rasanya akan begitu lapar. Begitu pulalah dengan rokok, kalau sudah biasa sebelum merokok terasa masih ada yang kurang. Demikianlah halnya dengan pemakai ganja, shabu, putaw dan lain-lainnya, berasal dari adanya rasa ingin tahu (coba-coba).

### E. Bentuk-Bentuk Pencegahan Penyakit Masyarakat

Pergaulan serta lingkungan yang tidak baik adalah salah satu faktor munculnya Penyakit masyarakat yang mengakibatkan banyaknya terutama generasi muda yang terjerumus karena akibat coba-coba dan pada akhirnya melakukan tindakan yang negatif dan merusak mental serta perilakunya sehingga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat .Dalam menghadapi Masalah Penyakit Masyarakat yang sedang marak marak nya terjadi ada beberapa metode Penanggulangan yang bisa dilakukan, Diantaranya :

1. Pemerintahan Daerah Wajib memberikan Penyuluhan Tentang Bahaya nya Penyakit masyarakat, Berupa Penyuluhan Tentang Lingkungan Hidup, Bahaya Narkoba, Bahaya Miras, Penyuluhan Tindak Kriminal dan lainnya yang berhubungan dengan Penyakit masyarakat guna untuk menjauhkan masyarakat dari perilaku yang menyimpang dan yang merusak norma serta aturan yang ada pada agama dan Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Masyarakat agar lebih aktif pada lingkungan yang positif seperti menghadiri Penyuluhan Penyuluhan, Menghadiri Pengajian, Memilih Lingkungan yang baik Tujuannya agar terhindar dari Perilaku negative yang bisa menjerumuskan masyarakat itu sendiri.
3. Bersama sama merangkul Masyarakat nya yang sudah terjerumus dalam Pekat
4. Lebih banyak diadakan nya kegiatan keagamaan dilingkungan warga

## F. Ketertiban Umum

### 1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum atau public policy memang sering ditemui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>39</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang

<sup>39</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.56.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>40</sup> Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar oleh karena Undang-Undang Nomor.30/1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang

---

<sup>40</sup> *Ibid* 56



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan.

Ketertiban Umum memiliki arti suatu keadaan agar pemerintah dan masyarakat berkegiatan secara aman, tertib dan teratur, dapat di simpulkan bahwa ketertiban umum adalah suatu kondisi yang dinamis yang berjalan teratur sesuai norma dan hukum yang berlaku. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah untuk tujuan pembangunan yang di harapkan.

### 2. Fungsi dan Tujuan Ketertiban Umum

Adapun dalam ketertiban umum terdapat fungsi dan tujuan sebagai tumpuan untuk pelaksanaan suatu tindakan ketertiban umum yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- b. Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.

### 3. Penyelenggara Ketertiban Umum Menurut Peraturan Daerah

Ketentuan mengenai penyelenggara ketertiban umum itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Dalam Pasal 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka 8 dikatakan bahwa pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah: “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”<sup>41</sup>

Untuk menciptakan ketertiban umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah. Penertiban tersebut dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang berwenang dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum.

## **G. Pemerintah Daerah**

### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut, Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>42</sup> Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi

<sup>41</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>42</sup>(Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan secara aktual. lembaga lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Negara.<sup>43</sup>

Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang.

## 2. Asas-Asas Pemerintahan Dearah

Dalam Pemerintahan selalu memiliki asas, termasuk Pemerintahan Daerah. Dalam Pelaksanaan Tugasnya Pemerintahan Daerah memiliki asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Inu Kencana Safei, menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti idiologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>[Http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html](http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html)

<sup>44</sup>Ibnu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.104

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas<sup>45</sup> :

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

---

<sup>45</sup>Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Macam-Macam Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.

Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Dalam Melaksanakan Tugasnya Pemerintah Daerah Dibantu oleh Perangkat Pemerintah Daerah salah satunya adalah Satpol PP dan Dinas Sosial Pada Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

## H. Pemerintah dalam Konsep Fiqh Siyasah

### 1. Negara Hukum Dalam Islam

Negara dalam islam tidak dapat disamakan dengan teokrasi seperti yang dipahami di Barat. Dalam Teokrasi, penguasa memegang mandate dari tuhan sementara dalam nomokrasi Islam, Kepala Negara (penguasa) menjalankan Negara dengan berdasar kepada hukum syariat yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya Muhammad Saw. Maka penguasa melaksanakan apa saja yang disebutkan dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam nomokrasi Islam, Kepala Negara bukanlah sosok *untouchable man*, dia sama dengan warga Negara lainnya yang tidak kebal dimata hukum, Kepala Negara hanyalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting sehingga semua tindakannya dapat dikontrol oleh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Negara Hukum ini telah lama berkembang bahkan pada zaman Aristoteles telah ada. Pada masa itu yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>46</sup>

Dalam perkembangan konsep negara hukum , Immanuel Kant juga berpendapat bahwa negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga saja agar hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar.

## 2. Otoritas dan Wewenang Penguasa

Kepemimpinan (leadership) adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi.<sup>47</sup> Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah dari pada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan merupakan relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil interaksi otomatis antara pemimpin dengan orang-orang yang

<sup>46</sup>Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), h. 166.

<sup>47</sup>Rivai Zainal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipimpinnya. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan.<sup>48</sup>

Kepemimpinan dalam interaksi manusiawi terkait langsung dengan masalah penyesuaian karakter atau kepribadian antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya atau sebaliknya. Penyesuaian tersebut dibutuhkan karena tidak ada dua manusia yang memiliki karakter dan kepribadian yang sama. Kepribadian seseorang pada dasarnya bersifat subjektif, yakni berupa konsep diri yang berpengaruh pada sikap dan tingkah lakunya. Sedangkan kepribadian yang dimaksud dalam kepemimpinan adalah sikap dan perilaku pemimpin yang terlihat oleh orang lain diluar dirinya. Dalam hal ini kepribadian bersifat objektif atau yang sebenarnya dari pemimpin itu. Sikap dan perilakunya akan menggambarkan tentang sifat-sifatn khas, watak, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, minat, perhatian, kebiasaan dll. <sup>49</sup>Karena itu, karakter seorang pemimpin agama juga dapat dinilai orang lain atau pengikutnya dengan melihat sikap dan tingkah lakunya. Inilah yang dinamakan kepribadian yang bersifat objektif dari seorang pemimpin agama.

<sup>48</sup>Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan: apakah pemimpin abnormal itu?/ Kartini Kartono*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5-8.

<sup>49</sup>Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1993), h. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Konsep Kepemimpinan Pemerintahan

Secara umum dapat dimaknai bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintahan atau secara operasional dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah penerapan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dibidang pemerintahan. Hubungannya dengan kepemimpinan pemerintahan Indonesia terdapat pada setiap tingkat pemerintahan, Nasional/Pusat,Provinsi,Kabupaten dan Kota, Kecamatan dan juga tingkat pemerintahan kelurahan/desa . Lebih lanjut jika pengertian ini dikaitkan dengan pemerintahan daerah maka kepemimpinan pemerintahan daerah adalah penerapan dasar-dasar kepemimpinan pada umumnya dalam sistem pemerintahan di daerah yang berdasarkan Pncasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>50</sup>

Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia maka pemimpin pemerintahan adalah mereka yang dikategorikan sebagai pemimpin pada ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislative maupun yudikatif. Dari sisi lain pemimpin pemerintahan dapat dibedakan menjadi pemimpin politik yang tersusun secara hirarkis mulai dari presiden yang dibantu para menteri, gubernur, bupati/Wali Kota dan kepala desa /lurah dan pemimpin yang menduduki jabatan structural yaitu mereka yang menduduki jabatan secara berjenjang yang tersusun dari eselon I,II,III,IV.

Para pejabat politik dan pejabat structural digolongkan sebagai pemimpin pemerintahan karena mereka adalah aktor pemerintahan yang

<sup>50</sup>Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 2009, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan maju serta mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Para pemimpin pemerintahan ini harus memiliki sifat dan perilaku yang bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya, siap mengorbankan diri demi membela martabat, kehormatan dan kejayaan bangsa dan negaranya serta jauh dari sifat mementingkan diri sendiri, boros, serakah, tidak dapat mengendalikan diri, dan sombong.

Bahwa saat ini telah terjadi perkembangan paradigma dalam pemerintahan yakni bergesernya sistem pemerintah yang digerakkan oleh Visi dan Misi, memusatkan perhatian pada keluaran (output) yang efisien bukan kepada masukan (kenaikan anggaran setiap tahun) yang mengarah kepada maksimalisasi masukan dibanding maksimalisasi keluaran, pemerintah hendaknya berperilaku seperti dunia usaha dalam hal pelayanan masyarakat. Dimana masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Selain pemerintah lebih tepat berorientasi pada mekanisme kerja partisipatif dari pada mekanisme kerja hirarkis.<sup>51</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin pemerintahan merupakan figure yang menentukan keefektifan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kepabtiitas pemerintahan dalam

<sup>51</sup>Zulkarnaini, *Reiventing Kelembagaan Pemerintahan Daerah yang Ramping dan efisiensi*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21. 4, 2013, h. 3-5.

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian pemerintah dituntut untuk menjaga rakyatnya dari kemungkaran dan memerintahkan untuk kebaikan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis di lapangan serta pembahasan yang berhasil disampaikan diatas, maka yang dapat ditarik kesimpulan adalah:

1. Satpol PP dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan, Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat belum terlalu sesuai karena Satpol PP hanya melakukan pengawasan apabila ada laporan dari masyarakat namun apabila tidak ada laporan maka Satpol PP tidak akan menertibkan pedagang-pedagang tuak tersebut karena terasa tidak meresahkan bagi masyarakat. Dari hasil penelitian penulis di lapangan maka penulis mendapati Peran Satpol PP kurang maksimal.
2. Selain itu , hal ini juga banyak terdapat faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir contohnya ada beberapa faktor yaitu terutama banyak nya pedagang tuak yang menjual minuman tuak secara sembunyi-sembunyi dan adanya faktor internal dan eksternal.

Faktor internal adalah dimana kurangnya kekuatan aparat penegak hukum yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah di Indragiri Hilir sehingga Satpol PP sulit memfokuskan untuk menertibkan pedagang tuak dengan keterbatasan yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor eksternal adalah dimana kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kerja Satpol PP masih kurang, sehingga banyaknya pedagang-pedagang tuak sulit untuk ditertibkan karena masyarakat hanya banyak diam saja akan keberadaan banyaknya pedagang-pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir.

3. Dalam pandangan *Fiqh Siyasah* peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak belum sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dan prinsip pelaksanaan hukum. Selain itu, peran dan tugas drai Satpol PP juga belum sejalan dengan konsep *wilayatul al-hisbah* dan *Maqashid Syariah* dimana lembaga pengawasan ini mempunyai fungsi pengawasan dan mengadili terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan bertujuan agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Tak hanya itu lembaga ini pun berhak mengadili dan menindak apabila ada yang melakukan kecurangan atau pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP dalam menjalankan perannya belum sesuai dengan yang ada dalam *fiqh siyasah*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari pemaparan dan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Satpol PP seharusnya bertindak tidak harus menunggu laporan dari masyarakat saja baru bertindak terhadap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maraknya pedagang tuak di Indragiri Hilir, Satpol PP harus melakukan kegiatan pengawasan rutin minimal setidaknya satu minggu sekali langsung melakukan pengawasan dilapangan agar tidak semakin banyaknya salah satu penyakit masyarakat yang satu ini semakin berkembang agar menciptakan suatu daerah yang aman dan tentram karena minuman tuak adalah salah satu minuman yang menyebabkan suatu perilaku yang menyimpang yang bisa dilakukan oleh seseorang karena tidak sadarkan diri.

2. Satpol PP juga semestinya memberikan pembinaan kepada pedagang-pedagang tuak agar termotivasi beralih profesi untuk tidak lagi menjual minuman tuak karena sudah jelas secara peraturan itu dilarang dan ketika melakukan penertiban ke pedagang tuak Satpol PP setidaknya harus memberikan efek jera yang memang benar-benar bisa membuat pedagang-pedagang tuak jera dan berhenti, agar mereka tidak menyepelekan aturan pemerintah yang sudah ada di Indragiri Hilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Iplementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana 2003)
- Abu Ridha, *Karakteristik Politik Islam*, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002)
- Dirdjosisworo Soedjono, *Minuman Keras diIndonesia dan Dampaknya*, (Bandung : Press,1994)
- Dirjen PUOD, *Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja*, (Jakarta:Dirjen POUD)
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Iplementasi KemaslahatanUmat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007)
- Hak Cipta, 2020. Dimiliki oleh penulis, dipublikasi oleh Society, Artikel dengan akses terbuka. lisensi : CC-BY-NC-SA <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.168>, h.261.
- Hartati Nurwijaya, *Bahaya Minuman Keras Dan Cara Mencegahnya*, (Bandung: Gramedia,2011), h.3
- <http://Sejarah Satpol PP>. Diakses 7 maret 2021 pukul 19:07
- <http://emmyfaryda.blogspot.com/01/03/ulil-amri-dalam-islam.html> di akses tanggal 7 April 2021.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tembilahan\\_Indragiri\\_Hilir](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tembilahan_Indragiri_Hilir). Diakses 4 Februari 2021 pukul 14:46
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tembilahan\\_Indragiri\\_Hilir](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tembilahan_Indragiri_Hilir). Diakses 4 Februari 2021 pukul 14:48
- <https://inhilkab.bps.go.id> di akses tanggal 29 januari 2021 pukul 15:55
- <https://polpp.kulonprogokab.go.id> di akses tanggal 26 Maret 2021 pukul 23:57
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung :Penerbit Angkasa, 2005),
- Imam Amrusi Jalani dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya:IAIN Press, 2011)
- Irwanti Said, *Analisis Problem Sosial* (Makassar : Allaudin University Press, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

J. Dwi Narwoko dan Suyatno Bagong, “*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*”.(Jakarta: Kencana, 2013)

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997)

Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2020 [www.inhilkab.bps.go.id](http://www.inhilkab.bps.go.id). Di akses tanggal 29 januari 2021

Kantor Camat Tembilahan, dilihat pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 10:21

Kejahatan atau Kriminal adalah pelanggaran terhadap peraturan yang telah dicantumkan dalam undang-undang. Lihat: James M.Henslin,*Sosiologi dengan pendekatan Membumi*, (Jakarta: Erlangga, 2006)

M. Abdullah Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir lengkap*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i)

M. Wresniworo, *Masalah Narkotika, Psikotropika Dan Obat-Obat Berbahay*, (Jakarta : Bina Dharma Pemuda Perinting, 1999)

Muchtadi TR Sugiono <https://www.definisidariparaahli.com/pengertian-tuak/> di akses tanggal 21 januari 2021.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet -2*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Muhammad Jafar Anwar, *Penyakit Masyarakat di Jakarta*, (Jakarta:Artikel Univeritas Ibnu Khaldun Jakarta, 2005), h.2

Mutiara Fahmi, “*Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*”.

Penyimpangan merujuk pada pelanggaran norma, mulai dari pelanggaran sekecil mengemudi melampaui batas kecepatan maksimum, sampai dengan seserius seperti pembunuhan, atau hal-hal yang lucu(Jakarta: Erlangga, 2006), Jilid I, h.150.

Perda No. 11 Tahun 2016.

Perda No.11 Tahun 2016.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengatur Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju ,1998)

RP12-JM KABUPATEN INHIL (2015-2019 ), “*Laporan Final Bab IV. Profil Kabupaten Indragiri Hilir*.”

Sarlito Wirawan Sarwono memandang perilaku sakit diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memperoleh kesembuhan, sedangkan perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, *Sosiologi Kesehatan : Beberapa Konsep Serta Aplikasinya*. (Bandung: Gajah Mada University Press, 1993)

Silyia Heppy Octavani, *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mnenegakan Ketertiban Umum* (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja), Jurnal Administrasi Publik, Vol . 1 No .9, 2013.

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Srijanti & A. Rahman. *Etika Berwarga Negara*. (ed.2). (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

Sukma Mardiyah Panggabea, “Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak Di Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Berita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015” *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), Hal. 28. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30121/SUKMA%20MARDIYAH%20PANGGABEAN-FKIK.Pdf> di akses 8 April 2021.

Syeni Adestina Savira, “*Persepsi Ekonomi Penjual Tuak Di Desa Palang Kabupaten Tuban Terhadap Penjualan Tuak*” , Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hal 37, [http://digilib.uinsby.ac.id/33299/1/syeni%20Adestina%20Savira\\_G7421518.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/33299/1/syeni%20Adestina%20Savira_G7421518.pdf) diakses pada tanggal 21januari 2021.

Syeni Adestina Savira, “Persepsi Ekonomi Penjual Tuak”, hal.38.

Toha Andiko, *Pemberdayaan Qaw’aid Fiqhiyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah*, Moder, Jurnal Al-Adalah, Vol. 1, No. 1, 2014

Tryono. Naskah Publikasi Gambaran Persepsi Peminum Alkohol tentang Dampak Kesehatan pada Peminum Alkohol di Dukuh Mendungan.2014 Online at [http://eprints.ums.ac.id/32252.14/2.%20PUBLIKASI%20PDF.pdf\(03/12/2020\)](http://eprints.ums.ac.id/32252.14/2.%20PUBLIKASI%20PDF.pdf(03/12/2020))

Uknow <http://arlinton-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentang-tuak-html> diakses tanggal 8 April 2021

Uknow, <https://arlinton-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentang-tuak.html> diakses tanggal 22 januari 2021.

Via Al-Qur’an Indonesia <http://quran-id.com>

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyudi., “*Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Di Kota Palopo*”, h. 23. Di akses pada tanggal 7 maret pukul 09:26 wib .

Yayasan Al-Hisbah Bogor-Indonesia, <http://hisbah.net> “Definisi Hisbah” (On-Line) diakses tanggal 7 Januari 2021

Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan Ke Satpol PP

1. Apakah Satpol PP Indragiri Hilir banyak mengetahui keberadaan pedagang-pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan?
2. Bagaimana Peran Satpol PP dalam menangani banyaknya pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan dan disekitarnya?
3. Apa faktor-faktor penghambat peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak ?
4. Bagaimana tanggapan Satpol PP dengan banyaknya keberadaan pedagang tuak?
5. Apakah Satpol PP pernah memberikan pembinaan kepada pedagang-pedagang tuak ketika menertibkannya?
6. Berapa kali dalam setahun Satpol PP melakukan razia terhadap pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan?
7. Sudah berapa banyak pedagang yang sudah beralih Profesi?
8. Seberapa banyak pedagang yang masih buka meskipun sudah pernah kena razia?

### B. Pertanyaan ke salah satu pedagang tuak

1. Apakah ibuk pernah terzaring razia oleh Satpol PP berdagang tuak ?
2. Apakah Satpol PP pernah memberikan pembinaan terhadap ibuk ?
3. Bagaimana sikap pedagang tuak ketika terjaring razia oleh Satpol PP, Menerima/Tidak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Bersama Bapak Abdul Rahmat Nurdin Kasatpol PP Indragiri Hilir

Wawancara bersama Bapak Andi Sapta Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat





## Kantor Satpol PP Indragiri Hilir Jln.Swarna Bumi Tembilahan



Wawancara dengan ibuk lilis 42 Tahun pedagang tuak, di jalan kembang Kecamatan Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

### REKOMENDASI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY) Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/81

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39972 Tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: AGUNG SETIA BUDI
NIM	: 11720415222
Program studi/Jenjang	: Hukum Tata Negara / S1
Alamat	: Jl. Pendidikan RT. 001 RW. 005 Kel. Tagaraja Kec. Kateman
Judul Penelitian	: PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Lokasi Penelitian	: 1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. INHIL 2. KECAMATAN TEMBILAHAN

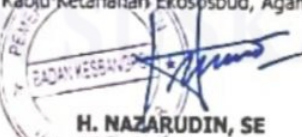
Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 29 Maret s/d 29 Juni 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 29 Maret 2021

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

  
H. NAZARUDIN, SE  
Penata TK. I  
NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Maret 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3015/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AGUNG SETIA BUDI  
NIM : 11720415222  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : KECAMATAN TEMBILAHAN

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang  
berjudul : PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK  
BERDASARKAN PERDA NO.11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN  
PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI  
KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI IHLIR MENURUT  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Des. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dprmtsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503.DPMTSP/NON IZIN-RISET/39972  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
 Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :  
 Un.04.F.II.PP.00.9/3015/2021 Tanggal 18 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

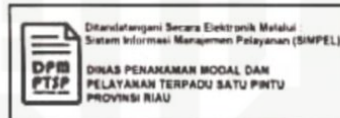
- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : AGUNG SETIA BUDI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11720415222   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAH BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN TEMBILAHAN  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 Maret 2021



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
 Uu. Kaban Kosbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAH BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KAB. INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **AGUNG SETIA BUDI**  
 NIM : **11720415222**  
 Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 08 Juni 2021**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Online (Daring)**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr.Amrul Muzan, S.Hi, M.Ag**

Penguji II  
**Bambang Hermanto, M.Ag**

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : AGUNG SETIA BUDI  
**NIM** : 11720415222  
**JURUSAN** : TATA NEGARA (SIYASAH)  
**JUDUL** : PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

**Pembimbing:** Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430/201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**AGUNG SETIA BUDI**, Lahir di Sungai Guntung Kecamatan Kateman pada tanggal 09 September 1998. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan ayahanda Fahrurrazi S.Pd dan Ibunda Harkasih. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 006 Tagaraja Kecamatan Kateman, Sungai

Guntung Riau Lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kateman, Lulus pada tahun 2014, Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 2 TEMBILAHAN KOTA dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian lapangan dengan judul “ *Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan, Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*” Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 08 Juni 2021 jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.30 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)